

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan adalah penerimaan pajak (Kartawan dan Kusmayadi, 2002). Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut Helmi (2018) dikutip dari harianbhirawa.com yang di akses pada tanggal 8 juni 2018 Penerimaan pajak oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I hingga Mei 2018 mencapai 34,88 persen dari total target Rp46,9 triliun. Capaian tersebut tumbuh 11,07 persen dibanding bulan yang sama tahun 2017, Menurut Heru, pajak tersebut terbesar diperoleh dari lima sektor. Sektor industri pengolahan sebesar 46,20 persen, perdagangan besar dan eceran 22,73 persen, jasa keuangan dan asuransi 6,84 persen, transportasi dan pergudangan 5,30 persen, dan jasa konstruksi 3,84 persen.

Sementara realisasi pelaporan SPT tahunan hingga akhir Mei 2018 sebanyak 287.228 laporan dari 363.397 laporan, sebanyak 240.349 dilaporkan melalui e-Filling. Ini artinya tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 79,04 persen. Dari data

yang disampaikan, pajak penghasilan yang berhasil dikumpulkan Kanwil DJP Jatim I dari bulan Januari hingga Mei 2018 telah mencapai 33,93 persen dari target atau Rp 7,9 triliun dari Rp 23,4 triliun. Sedangkan untuk PPN dan PPnBM telah mencapai 18.52 persen, yakni Rp 8,3 triliun, dari Rp 23,1 triliun. Dan pajak lainnya telah mencapai 20.45 persen dari Rp 249 milyar yang ditargetkan, yakni Rp 80 miliar.

Tabel 1.1
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

Tahun	Jumlah Wajib Pajak orang pribadi	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2015	85.185	590.256.279.941	20,39%	74,34%
2016	90.663	661.873.179.545	12,13%	73,66%
2017	95.024	753.537.339.953	13,85%	84,59%
2018	96.729	855.759.619.598	13,57%	81,76%

Sumber: Data dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Fenomena peningkatan penerimaan pajak tersebut juga di alami oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo bertolak belakang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana tingkat kepatuhan mengalami penurunan dari 84,59 persen pada tahun 2017 menjadi 81,76% di tahun 2018, yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak juga mengalami penurunan.

Upaya untuk dapat meningkatnya penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Salah satu pihak yang dapat membantu peran pemerintah yaitu masyarakat. Dimana masyarakat memiliki peran penting dalam sektor perpajakan.

Masyarakat atau wajib pajak dapat membantu peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak apabila masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak. Pengertian kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan yang melibatkan pengetahuan dan penalaran yang disertai tindak lanjut sesuai sistem dan ketentuan perpajakan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hestin dan Eunike (2016), Budi, dkk (2016), Wiolda (2015) dan Ardiani, dkk (2012) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2017) dan Fatun dan Agus (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor perpajakan guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hestin dan Eunike (2016) dan Budi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelina, dkk (2015) bahwa semakin banyak masyarakat yang

memiliki NPWP tidak menyebabkan kenaikan jumlah penerimaan pajak secara signifikan. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, banyak wajib pajak yang telah memiliki NPWP akan tetapi jumlah penghasilan yang diperoleh masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga menyebabkan tidak adanya pajak terhutang atau yang disebut juga dengan pajak nihil.

Selain memiliki kesadaran dan mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP, wajib pajak juga memiliki hak dan kewajiban untuk membantu proses penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak sampai tanggal yang telah ditetapkan belum juga melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menagih utang pajak terhadap wajib pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak dapat membantu proses penagihan pajak sesuai undang-undang yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh penelitian Indira, dkk (2017), Hestin dan Eunike (2016), Budi, dkk (2016), yang berarti penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun kurangnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak serta kurang optimalnya kinerja dari pegawai perpajakan dalam hal ini para penagih pajak yang bertugas dalam tindakan penagihan melakukan upaya untuk membuat wajib pajak segera melunasi kewajiban perpajakannya sehingga tindakan penagihan pajak ini tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Waluyo (2016), Rosy dan Kiswanto (2015), dan Adelina, dkk (2015).

Selain memiliki hak dalam membantu proses penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, wajib pajak juga memiliki tanggungjawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut berdasarkan sistem *self assessment*. Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pemkasilan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau wajib pajak maka peran pemerintah dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak tidak akan berjalan dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Yuli (2017) dan Fatun dan Agus (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan wajib pajak membayar pajak bukan karena kesadaran dan kepatuhan melainkan adanya penagihan dari petugas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2016), Rosy dan Kiswanto (2015), dan Ardiani, dkk (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan juga merupakan daerah yang menojol dalam sektor jasa dan perdagangan. Hal tersebut memungkinkan wajib pajak ikut serta dalam membantu pemerintah dalam

meningkatkan penerimaan pajak. KPP Pratama Surabaya Wonocolo ini juga merupakan salah satu KPP yang ada di Kantor wilayah DJP Jawa Timur 1 (Kanwil DJP Jatim 1) yang telah memperoleh peringkat empat nasional dalam hal penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya bantuan masyarakat atau wajib pajak dalam hal meningkatkan penerimaan pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPEMILIKAN NPWP, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian adalah:

1. Bagi wajib pajak, yaitu diharapkan bisa menambah wawasan serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah meningkat penerimaan pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan yang bermanfaat.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya, yaitu dapat memberikan tambahan informasi dan mengetahui pengetahuan tentang penerimaan pajak dan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian.
4. Bagi STIE Perbanas Surabaya, dapat dijadikan sebagai tambahan referensi pustaka dan sebagai bahan perbandingan untuk semua mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.